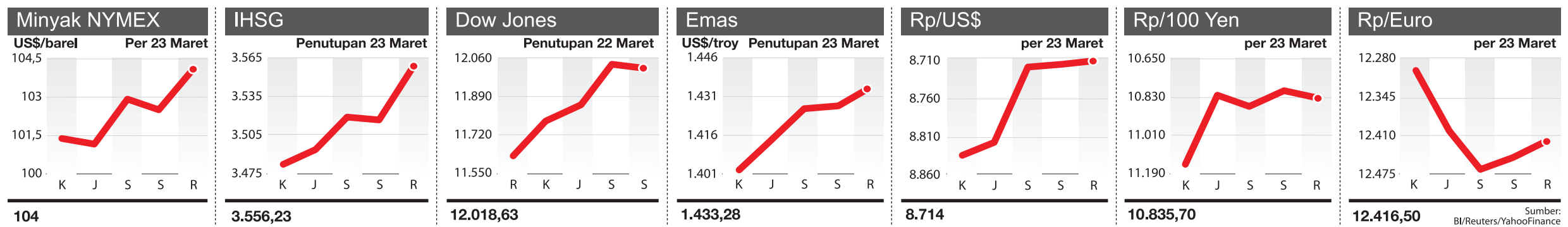




Krisis Jepang Pacu Suku Cadang

Krisis industri otomotif Jepang pascagempa dan tsunami memacu industri suku cadang di negara Asia lainnya untuk bergerak maju.

Fokus Otomotif, Hlm 22-23



Perdagangan Indonesia-China 2009-2011 (nonmigas - ribu US\$)

	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
2009	10.917.772	14.800.884	-3.883.112
2010	17.773.015	23.728.406	-5.955.391
2011*	1.311.020	1.983.778	-672.758

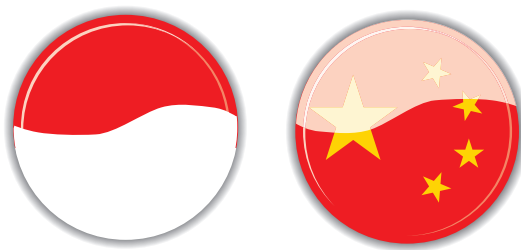
Tahun 2009 belum diberlakukan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area)

Keterangan:
* Bulan Januari

Beberapa komoditas ekspor unggulan Indonesia ke China berupa: lemak dan minyak nabati, karet, bahan kimia organik, dan pulp.



ANTARA/SENO S



Dampak Pemberlakuan ACFTA terhadap Beberapa Sektor Industri

Sektor	Peningkatan Impor Bahan	Penurunan Produksi Baku	Penurunan Penjualan	Penurunan Keuntungan	Pengurangan Tenaga Kerja
Mesin		✓	✓		
Elektronika	✓	✓	✓	✓	✓
TPT** (Garmen)	✓	✓	✓	✓	✓
TPT** (Grey)		✓			✓

Keterangan:

✓ Memiliki dampak yang kuat ** Tekstil dan Produk Tekstil

Sumber: Ditjen Bea Cukai/Kementerian Perindustrian/GRAFIS: TIVOK



DOK MI/Teresia Aan Meliana

China Hujani Indonesia dengan Barang Dumping

Tim survei juga menemukan adanya kecenderungan China untuk mengekspor barang yang sudah tidak laku di negeri itu.

JAJANG SUMANTRI

KEMENTERIAN Perindustrian menemukan indikasi praktik dumping yang diterapkan China dalam mengekspor sejumlah barang ke Indonesia. Hal itu 'membantu' mengukuhkan dominasi China dalam perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA).

"Berdasarkan hasil survei harga barang China di Indonesia terdapat 190 barang yang perlu ditelaah lebih lanjut. Dari 190 barang tersebut ditemukan 38 yang harga jualnya di Indonesia lebih murah (dumping)

daripada harga jual di pasar domestik mereka," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian, Agus Tjahayana di Jakarta, kemarin.

Meski demikian, Agus menyatakan tidak mampu berbuat banyak untuk menghentikan praktik tersebut. Pihaknya hanya bisa mendorong produsen dalam negeri untuk mengajukan keberatan berupa petisi dumping kepada pemerintah yang akan melakukan kajian terhadap praktik tersebut.

"Kami hanya bisa memfasilitasi untuk pengajuan keberatan tersebut karena sesuai aturan WTO (World Trade Organization) harus ada pihak yang

dirugikan, dalam hal ini produsen lokal," tuturnya.

Selain itu, tim survei menemukan adanya kecenderungan China untuk mengekspor barang yang sudah tidak diminati konsumen di negeri itu. Barang tersebut di antaranya TV tabung dan pemutar cakram video (video compact disc/VCD).

Saat menanggapi hal itu, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menyatakan indikasi praktik dumping oleh China telah terlihat bahkan sebelum ACFTA berlaku pada 1 Januari 2010 lalu.

Pemerintah, imbuhnya, harus segera menempuh cara untuk mengajukan keberatan terhadap praktik dumping tersebut. Selain itu, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus dipercepat untuk membendung produk murah dari China.

Di tengah gempuran produk

China, industri juga menghadapi masalah lain. Tingginya biaya logistik di Indonesia sering kali dikeluhkan para pengusaha karena melemahkan daya saing. Berdasarkan survei Logistics Performance Index (LPI) oleh Bank Dunia, posisi Indonesia merosot dari urutan ke-43 pada 2007 menjadi 75 di 2010.

Adapun berdasarkan hasil penelitian Asia Foundation dan LPEM UI, biaya rata-rata truk operasional di Indonesia sekitar US\$0,34/km, lebih tinggi daripada rata-rata Asia US\$0,22/km. Masalah biaya logistik bermuara pada infrastruktur yang tidak memadai.

Oleh sebab itu, menurut Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani, pemerintah harus fokus untuk meningkatkan daya saing industri nasional dengan kebijakan yang men-

dukung serta peningkatan infrastruktur dan pasokan energi yang cukup.

Minta perlindungan

Dalam upaya menyelamatkan industri domestik, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPPI) mengajukan usulan kenaikan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) enam produk domestik.

Keenam produk tersebut adalah kawat bendrat, kawat seng, tali kawat baja 1, kawat baja 2, kain tenun dari kapas, serta benang kapas selain benang jahit.

Ketua KPPPI Halida Miljani mengungkapkan, industri-industri domestik yang memproduksi enam produk tersebut mengalami kerugian serius akibat tingginya volume impor barang sejenis. (Tup/AX/E-1)

jajang@mediaindonesia.com

Dunia Usaha Terbebani Pembatasan BBM

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia keberatan dengan rencana pemerintah menerapkan pembatasan dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Harapan kami tidak terjadi karena berdampak pada dunia usaha dan rakyat. Kami mengharapkan pemerintah tinjau ulang rencana itu atau ditunda," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, pemerintah dan DPR sepakat menunda pembatasan konsumsi BBM yang rencananya dilaksanakan pada 1 April 2011. Tingginya inflasi serta disparitas harga antara premium dan pertamax menjadi alasan mundurnya

program.

Di pihak lain, Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengaku belum bisa memastikan kapan program pembatasan BBM subsidi yang berkali-kali tertunda akan dilaksanakan. Kendati begitu, parlemen meminta persiapan pembatasan secara paralel dijalankan hingga waktu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 pada Mei nanti.

"Pengaturan BBM bersubsidi itu terus berjalan karena amanat APBN, tetapi mekanisme persiapannya harus dimatangkan. Itu akan melibatkan rakyat banyak, jadi semua harus siap dan melihat risikonya," ujarnya.

Saat ditanya mengenai penambahan subsidi BBM, Riefky mengatakan opsi itu terbuka meskipun menjadi pilihan terakhir. Ini akan menjadi agenda pembahasan APBN-PMei nanti. Namun, jika pembatasan tidak diterapkan, anggaran subsidi dipastikan akan meleset.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan pembatalan pembatasan BBM subsidi sama sekali tidak melanggar UU APBN. Pengaturan konsumsi BBM dapat terus berjalan tanpa harus dengan konteks peralihan ke BBM jenis pertamax.

Rencana pembatasan BBM telah diwacanakan akhir 2008. Sejak itu sudah lima kali pemerintah memundurkan pemberlakuannya. (Nav/SZ/E-5)



ANTARA/ASEP FATIHLURAHMAN

BIAYA TRANSPORTASI: Peningkatan harga bahan bakar minyak bakal memicu kenaikan biaya transportasi sehingga akan memberatkan dunia usaha.

EKONOMIKA

Pembayaran Gaji TKI di Malaysia Wajib lewat Transfer Bank

PEMERINTAH Indonesia dan Malaysia menyepakati mekanisme pembayaran gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui transfer ke rekening bank milik tiap TKI. Kebijakan itu merupakan salah satu butir memorandum of understanding tentang pengiriman TKI ke Malaysia.

"Semua penggajian harus melalui perbankan," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di kantor Wakil Presiden, kemarin.

Dengan demikian, TKI memiliki bukti transfer gaji yang tercantum dalam buku tabungan. "Sehingga tidak ada komplain lagi gaji tidak dibayar," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah tidak menunjuk bank tertentu untuk menampung gaji para TKI. Artinya, TKI bebas membuka rekening di bank mana saja. (Mad/E-4)

Timor Leste Minati Usaha Mikro di Depok

KEMENTERIAN Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor Leste ingin bermitra dengan kalangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kreatif di Kota Depok.

Menteri Ekonomi dan Pembangunan Timor Leste Joao Mendes Goncalves, saat meninjau 70 produk yang dipamerkan di UMKM Center ITC Depok, mengatakan mengapresiasi pengusaha UMKM yang ingin memasarkan produk mereka di negara tersebut. Menurutnya, pemerintah Timor Leste sudah lama mengetahui produk UMKM Depok. "Ada peluang ekspor UMKM dibawa ke sana. Saya kira akan menguntungkan karena bebas bea masuk," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Depok Herman Hidayat mengatakan di Depok terdapat 286 asosiasi yang membina para pengusaha UMKM. Namun, kata dia, produk yang mereka hasilkan tidak maksimal karena para pelaku UMKM tidak memiliki tujuan pemasaran. (KG/E-4)

BKPM Bentuk Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan membentuk pelayanan terpadu satu pintu hingga ke tingkat kabupaten/kota untuk menangani masalah investasi.

"Investasi pada 2011 diharapkan meningkat, salah satu langkahnya adalah melalui pelayanan terpadu satu pintu hingga tingkat kabupaten/kota," kata Wakil Kepala BKPM, Ahmad Kurniadi dalam peluncuran Indonesia International Conference Focus on Indonesia's Economy (IICFIE) 2011 di Jakarta, kemarin.

Ahmad menyebutkan sejumlah kabupaten/kota sudah siap baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur untuk membentuk dan mengoperasikan pelayanan terpadu satu pintu. (Ant/E-4)

Jembatan Selat Sunda Segera Diatur Perpres

PEMERINTAH menjanjikan peraturan presiden (perpres) mengenai pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS) akan selesai dan diterbitkan pada April 2011. Perpres itu antara lain akan mengatur badan pelaksana serta tata cara penunjukan pengelola dan investor pembangunan JSS.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah sudah lama membahas rancangan perpres tersebut dan semua tahapan sudah dilalui. "Semua tahapan untuk membahas sudah dilalui. Kita harapkan draf awal perpres ini sudah final bulan depan," kata Hatta di Jakarta, kemarin.

Janji pemerintah tersebut merupakan jawaban atas desakan sejumlah pihak yang menginginkan pembangunan JSS bisa segera dilakukan.

Saat menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah meminta agar perpres tersebut dapat segera diterbitkan. Perpres akan menjadi payung hukum pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Lampung itu.

"Itu harapan kami. Apabila perpres diterbitkan, Pemprov Banten dan Lampung serta stakeholder akan melakukan joint venture. Sebelum perpres dikeluarkan, kita tidak bisa menentukan berapa biaya yang

dibutuhkan serta siapa pengelolanya," ujar Atut di Kantor Presiden.

Proyek pembangunan jembatan sepanjang 31 kilometer itu memang akan menitikberatkan pada keterlibatan Pemprov Banten dan Lampung selaku inisiator. Pemerintah menargetkan ground breaking pembangunan JSS akan dilakukan pada 2014 dengan nilai investasinya mencapai US\$10 miliar-US\$15 miliar.

“Kita harapkan draf awal perpres ini sudah final bulan depan.”

Hatta Rajasa
Menko Perekonomian

Namun sebelumnya, sejumlah kalangan meminta agar titik awal pembangunan bisa dipercepat menjadi 2013 mengingat 2014 adalah tahun politik.

Menurut pakar hukum laut internasional Hasjim Djalah, secara teknis JSS sudah bisa dibangun secepatnya. Begitu pula dari sisi hukum yang menaunginya, percepatan pembangunan JSS bukanlah masalah.

"Menurut saya, secepatnya ada keputusan makin baik. Secepatnya ada permulaan juga makin baik karena ini pekerjaan besar," tutur Hasjim, beberapa waktu lalu. (Nav/SZ/E-2)